

BAB II

HUBUNGAN PERDAGANGAN INDONESIA-CHINA-AMERIKA SERIKAT

2.1 Sejarah Hubungan Diplomatik Indonesia, China, dan Amerika Serikat

2.1.1 China dengan Amerika

Hubungan China dengan Amerika Serikat sudah terjalin sejak sekitar tahun 1784 ketika Amerika Serikat baru mengirim kapal *Empress of China* untuk perdagangan langsung ke pelabuhan Kanton yang sekarang adalah Guangzhou. Saat itu dimulainya perdagangan rempah, teh, dan sutera. Lalu, pada tahun 1843, tepat 60 tahun setelah pelayaran pertama, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yaitu Daniel Webster, memutuskan untuk mengutus Caleb Cushing sebagai perwakilan diplomatik Amerika Serikat secara khusus untuk melaksanakan diskusi soal perjanjian perdagangan dan diplomatik dengan Dinasti Qing. Pada tahun 1844, Amerika Serikat berhasil menandatangani Perjanjian Wangxia dengan Dinasti Qing yang membuka hubungan diplomatik resmi dan perdagangan terbatas. Setelah itu, China membangun perwakilan di Washington, D.C. pada tahun 1878 dengan mengutus Chen Lanbin sebagai duta besar pertama China untuk Amerika Serikat, yang menandai awal hubungan diplomatik penuh antara China dan Amerika Serikat (Ridwan Azhari Akbar, 2024).

Hubungan diplomatik Amerika Serikat dan China sempat terputus hingga kembali ke normal setelah kunjungan Presiden Richard Nixon ke China pada tahun 1972 untuk menormalisasikan hubungan setelah isolasi yang sangat lama selama 20 tahun. Lalu, ketika Amerika Serikat mengalami stagnasi ekonomi setelah krisis keuangan *subprime mortgage* tahun 2008, di sisi lain, kondisi ekonomi China

mengalami penguatan di dunia. Meskipun sempat terjadi perselisihan, salah satunya terkait Kepulauan Diaoyu, hubungan kedua negara adidaya tersebut pada saat yang sama juga sangat signifikan dalam perdagangan dan investasi. Maka, hal ini bisa dikatakan bahwa hubungan mereka bukan hanya tentang rivalitas, tetapi juga tentang kerja sama (Ridwan Azhari Akbar, 2024).

Pada tahun 1979, “Satu Tiongkok” resmi diakui oleh Amerika Serikat, tepatnya ketika Jimmy Carter menjabat sebagai presiden Amerika Serikat. Lalu, memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan membangun hubungan diplomatik penuh dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sembari tetap menjaga hubungan informal dan hubungan senjata dengan Taipei lewat *Taiwan Relations Act*. Hubungan kerja sama Amerika Serikat dengan China mulai normal dan stabil kembali, sempat ditopang oleh perdagangan serta investasi yang tumbuh dengan pesat. Produk manufaktur China dimanfaatkan oleh Amerika Serikat sebagai pasar ekspor besar, serta tenaga kerja dan rantai pasok di China pun terlibat dalam perusahaan Amerika Serikat. Pada tahun 2001, China mulai bergabung dengan *World Trade Organization* (WTO) yang berpengaruh pada percepatan integrasi ekonomi kedua negara tersebut. Walaupun isu defisit perdagangan, transfer teknologi, hingga kebijakan subsidi mulai menciptakan ketegangan, hubungan perdagangan antara kedua negara adidaya tersebut menjadi saling tergantung (Yantina Debora, 2025).

Pada tahun 2010, China mulai menjadi negara dengan kondisi ekonomi terbesar kedua di dunia hingga mampu memperluas kekuatan militernya di Laut Tiongkok

Selatan serta berhasil meluncurkan *Belt and Road Initiative (BRI)*. Namun, Amerika Serikat justru mulai memandang China bukan sekadar mitra ekonomi, tetapi sebagai saingan strategis utamanya. Lalu, ketika pemerintahan Amerika Serikat pada tahun 2018 di bawah pimpinan Donald Trump, mulai ada pemicu perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Tarif impor barang China naik secara besar-besaran. Trump melontarkan tuduhan kepada China atas praktik tidak adil seperti transfer teknologi paksa dan manipulasi mata uang. Tuduhan tersebut tetap berlanjut dengan kebijakan ketat di bidang teknologi, salah satunya adalah semikonduktor di bawah pemerintahan Biden (Yantina Debora, 2025).

2.1.2 China dengan Indonesia

Kerja sama di forum Asia-Afrika pada tahun 1950-1965 menjadi tanda pembukaan secara resmi untuk hubungan diplomatik Indonesia dan China. Indonesia menjadi salah satu negara Asia Tenggara pertama yang menjalin hubungan resmi dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di tengah Perang Dingin. Pada konferensi Asia-Afrika di tahun 1955, pemerintahan Indonesia di bawah pimpinan Ir. Soekarno dan China, diwakili oleh Zhou Enlai, memperkuat solidaritas negara Asia-Afrika, dengan maksud memberi dorongan serta dukungan dekolonisasi berdasarkan prinsip non-blok sebagai alternatif terhadap polarisasi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Saat itu, kerja sama antarnegara seperti di bidang perdagangan, pertukaran budaya, dan kunjungan pejabat masih bisa dikatakan terbatas dalam dimensi politik dan ekonomi. Namun, suasana bilateral relatif harmonis karena kedua pihak dalam koalisi

“Bangsa Timur” yang kompak antikolonial dan antiimperialisme (Haryo Wibisono, 2018).

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan China awalnya berjalan dengan cukup baik sejak tahun 1953, khususnya di bidang ekonomi. Namun, situasi berubah drastis ketika Gerakan 30 September pada tahun 1965 (G30S) mulai terjadi dan melibatkan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang memiliki hubungan ideologis dengan Partai Komunis Tiongkok. Pemerintahan Indonesia menuduh China terlibat dalam kudeta tersebut yang menyebabkan ketegangan, dan akhirnya Indonesia memutuskan untuk menghentikan hubungan diplomatik dengan China pada tahun 1967. Ketika Indonesia masuk ke era Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Hubungan antara kedua negara tersebut tetap tidak dijalankan kembali, yang menimbulkan rasa curiga terhadap persebaran ideologi komunisme. Namun, akhirnya jalur diplomasi kembali dibuka secara resmi pada tahun 1990 sembari memulihkan hubungan diplomatik melalui proses bilateral dan rekonsiliasi internasional, seiring terjadinya perubahan politik dan ekonomi di kedua negara tersebut (Arum Nur Khasanah, 2025).

Setelah hubungan Indonesia dan China sempat terputus selama 23 tahun sejak tahun 1967, kedua negara tersebut akhirnya mengalami pemulihan pada periode 1990 hingga akhir 1990-an dan setuju untuk melanjutkan kembali hubungan diplomatik penuh pasca-Perang Dingin dan di tengah perubahan orientasi politik dan ekonomi di kedua negara. Indonesia dan China membentuk dan melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU sebagai tanda penerusan hubungan diplomatik. Tidak hanya itu, mereka juga melakukan penempatan pada duta besar perdana setelah pemutusan,

sehingga dimulainya kembali kunjungan resmi pejabat tinggi dari kedua belah pihak. Pasca-1990, Indonesia dan China mulai menandatangani sejumlah perjanjian kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, kebudayaan, kesehatan, hiburan digital, dan olahraga yang membuka jalan kembali bagi peningkatan kerja sama praktis. Di sisi politik dalam negeri, kebijakan Orde Baru terhadap etnis Tionghoa dan perbaikan citra publik turut membantu melemahkan citra China sebagai “ancaman”. Akhirnya, China dipersepsikan oleh Indonesia tidak hanya sebagai lawan ideologis lagi, tetapi juga sebagai mitra yang berpotensi di bidang ekonomi dan diplomasi (Lembaga Indonesia dan China, 2002).

Kemitraan strategis mulai dijalankan oleh kedua negara tersebut sejak 2005 sebagai payung kerja sama yang mencakup politik, keamanan, ekonomi, dan budaya. China berperan sebagai salah satu mitra dagang dan investor utama di Indonesia hingga sekarang, contohnya pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan smelter nikel. Namun, hubungan ekonomi ini terkena cipratan defisit perdagangan, ketergantungan impor dari China, dan adanya ketegangan pada sektor industri domestik yang merasa terancam oleh kompetisi produk impor. Dalam hal keamanan dan maritim, kedua negara bekerja sama di Selat Malaka dan Laut Natuna. Mereka juga mengatur masalah batas perairan dan potensi konflik yang berkaitan dengan klaim China di Laut China Selatan yang berdekatan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Dalam aspek sosial dan budaya, kerja sama terlihat melalui beasiswa, program pertukaran siswa, pusat bahasa Mandarin seperti Hanban atau Institut Konfusius, dan film-film yang dibuat bersama. Komunitas antara China dan Indonesia berfungsi sebagai

jembatan budaya yang memperkuat hubungan sosial dan saling pengertian antara masyarakat (Kukuh Bhimo Nugroho, 2016).

2.1.3 Amerika Serikat dengan Indonesia

Hubungan kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat diawali dengan adanya pengakuan kedaulatan Indonesia pada tahun 1949, dari diplomasi politik dan keamanan, berlanjut ke bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan Indo-Pasifik. Hal ini karena Amerika Serikat menjadi salah satu negara penting dalam proses pengakuan secara internasional terhadap Indonesia setelah kemerdekaan 1945. Lalu pada tahun 1946, terdapat awak kapal yang berasal dari Indonesia yang tertahan di Texas akibat menolak melayani sebagai awak untuk sebuah kapal Inggris-Belanda bernama Martin Behrman yang bermuatan senjata dan amunisi. Namun, banyak orang Amerika yang memprotes penahanan mereka dan menuntut supaya mereka segera dibebaskan. Di sisi lain, Frank R. Havenner mengirim surat kepada Presiden Truman sebagai perwakilan Kongres yang menyampaikan petisi dari sekitar 5.000 orang yang meminta awak kapal Indonesia dibebaskan (Benedikta Miranti T.V., 2019).

Pada 28 Desember 1949, AS mengakui kemerdekaan Indonesia, dan hubungan bilateral formal pun dimulai. Merle Cochran kemudian menjadi duta besar AS pertama untuk Indonesia, sementara Ali Sastroamidjojo menjadi duta besar pertama Indonesia untuk AS pada 1950. Sebelum pengakuan itu, Amerika Serikat juga berperan dalam diplomasi awal Indonesia, termasuk dalam Perjanjian Renville 1947 melalui Komisi Tiga Negara bersama Australia dan Belgia. Pada awal tahun 1950, kolaborasi antara

kedua negara ini mulai berkembang ke dalam sektor ekonomi dan diplomasi pembangunan. Salah satu momentum yang signifikan adalah penandatanganan perjanjian kerja sama ekonomi yang berlangsung pada 16 Oktober 1950 di Jakarta. Pada periode tersebut, hubungan tetap terpengaruh oleh situasi Perang Dingin, sehingga kepentingan geopolitik Amerika Serikat di Asia Tenggara turut memengaruhi arah hubungan dengan Indonesia (dr. Vera Herlina, S.E.,M.M., 2025).

Pada masa Presiden Soekarno, interaksi mengalami fluktuasi. Di sisi lain, Amerika Serikat memberikan dukungan kepada gerakan nasionalis Indonesia. Namun, relasi menjadi tegang akibat Konferensi Asia-Afrika, posisi nonblok yang diambil Indonesia, serta hubungan Indonesia dengan Blok Timur pada waktu tertentu. Ketegangan dan kedekatan ini memperlihatkan bahwa relasi antara Indonesia dan Amerika Serikat sejak awal bukan hanya berkisar pada kerja sama ekonomi, melainkan juga berkaitan dengan persaingan pengaruh global. Secara umum, hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat bukan hubungan yang stabil dan lurus, melainkan hubungan yang naik-turun karena dipengaruhi oleh kepentingan geopolitik, Perang Dingin, dan perubahan rezim di Indonesia (Baskara T. Wardaya, 2008).

Pada masa pemerintahan Soeharto, interaksi antara kedua negara mengalami perbaikan sebab Amerika Serikat memandang Indonesia sebagai rekan strategis untuk mengatasi pengaruh komunisme di kawasan Asia Tenggara. Kerja sama dalam bidang keamanan, dukungan pembangunan, dan aspek ekonomi meningkat drastis selama periode ini. Meskipun demikian, hubungan tersebut juga mengalami kendala karena isu Timor Timur dan masalah hak asasi manusia yang mulai menarik perhatian serta

kritik dari pihak AS dan organisasi internasional. Setelah berakhirnya Perang Dingin, masalah hak asasi manusia menjadi semakin penting dalam hubungan antara kedua negara. Pada tahun 1999, AS menerapkan embargo senjata terhadap Indonesia setelah terjadinya kekerasan pasca-referendum Timor Timur, yang kemudian dicabut pada tahun 2005 saat kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Era reformasi menandai terjadinya transisi besar, yaitu hubungan antara kedua negara tidak lagi berfokus pada logika anti-komunisme, melainkan lebih pada aspek demokrasi, hak asasi manusia, dan kestabilan di tingkat daerah (Angela R. Faustine, 2020).

Dalam beberapa tahun terakhir, kerja sama antara kedua negara meningkat ke level kemitraan yang strategis. Pada tahun 2021, Amerika Serikat telah melakukan kolaborasi di sektor demokrasi, hak asasi manusia, keamanan laut, kesehatan global, ekonomi digital, dan penanganan perubahan iklim. Selain itu, ditegaskan juga bahwa Amerika Serikat dan Indonesia memiliki kemitraan strategis yang mendalam, dengan fokus pada kawasan Indo-Pasifik yang terbuka dan bebas serta kolaborasi di bidang pertahanan yang luas. Aspek ekonomi muncul sebagai salah satu pilar utama dalam hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Hubungan ekonomi bilateral semakin diperkuat dan bergerak menuju kemitraan strategis yang komprehensif pada tahun 2021, dengan manfaat nyata bagi perusahaan dan investasi dari kedua negara. Amerika Serikat juga menyoroti bahwa hubungan perdagangan dan investasi bilateral menciptakan peluang untuk penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, termasuk melalui peran perusahaan Amerika Serikat di Indonesia serta dukungan bagi investasi sektor swasta (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2025).

2.2 Konseptualisasi Perang Dagang (*Trade War*) dalam Ekonomi Politik Internasional

2.2.1 Definisi Ekonomi-Politik Perang Dagang

Negara dan pasar merupakan dua elemen yang saling terkait dalam evolusinya. Hal ini terjadi karena negara berfungsi sebagai cerminan dari sisi politik, sedangkan pasar mencerminkan aspek ekonomi yang sepanjang waktu memiliki hubungan yang erat satu sama lain (Istanul Badiri, 2020). Perang dagang menjadi salah satu strategi ekonomi dan politik suatu negara yang menggunakan kebijakan perdagangan seperti tarif, kuota, sanksi, atau pembatasan investasi sebagai instrumen politik luar negeri untuk memengaruhi perilaku negara lain demi kepentingan nasionalnya. Perang dagang juga bisa dikatakan sebagai konflik ekonomi yang dapat menyebabkan suatu negara mengalami penghambatan siklus perdagangan akibat tarif tinggi terhadap negara yang seharusnya menjadi negara sahabat (Meilany Dwi Syahfitri et al., 2024). Tindakan ekonomi yang dirancang dan dilakukan oleh suatu negara dalam perang dagang tidak hanya untuk memberi penekanan politik kepada target negara, tetapi juga untuk melindungi industri dalam negeri secara ekonomi semata. Di sisi lain, kebijakan perdagangan yang dirancang akan digunakan sebagai alat diplomasi dan koersi (Chindy Nurul Fadilah et al., 2025).

Perang dagang dipahami tidak hanya sebagai persaingan dalam sektor tarif, tetapi juga sebagai alat kebijakan luar negeri yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan politik. Hal tersebut digunakan untuk memberi dorongan pada perubahan kebijakan luar negeri, merugikan pesaing strategis, atau memperkuat posisi

dalam negosiasi baik di tingkat bilateral maupun multilateral. Motif di balik ini bersifat campuran yang dapat menggabungkan kepentingan di dalam negeri, misalnya perlindungan terhadap lapangan kerja dan industri penting, dengan tujuan geopolitik yang lebih luas. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menggunakan beragam mekanisme operasional dalam perdagangan, seperti menaikkan tarif, menerapkan kuota, membatasi ekspor teknologi, serta memanfaatkan regulasi nontarif. Langkah-langkah ini sering kali disertai dengan retorika politik, kampanye internasional, atau tindakan balasan yang memanfaatkan rantai pasok global untuk memberikan tekanan maksimal kepada negara yang menjadi sasaran (Alifia Sekar Kinanti et al., 2025).

Dalam sudut pandang ekonomi dan politik, konflik perdagangan tidak hanya mengubah keseimbangan perdagangan tetapi juga mengubah dinamika hubungan geopolitik, seperti pembentukan aliansi baru dan peningkatan persaingan dalam teknologi dan industri yang strategis. Selain itu, penerapan kebijakan perdagangan sebagai alat tekanan merusak integrasi rantai pasokan global dan menimbulkan ketidakpastian biaya serta penundaan produksi bagi banyak negara. Negara ketiga yang terkena dampak secara tidak langsung sering kali merespons dengan menyesuaikan kebijakan perdagangan, memperketat regulasi, dan berupaya mendiversifikasi mitra ekonomi agar tidak terlalu bergantung pada satu blok besar. Di tingkat internasional, penggunaan perdagangan sebagai alat politik dapat melemahkan norma-norma multilateral dan mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis aturan, khususnya dalam kerangka organisasi seperti WTO. Maka, karena itu, perang dagang dalam konteks ekonomi-politik bukan sekadar konflik ekonomi, melainkan pendorong

yang mengubah pola aliansi, mengganggu rantai pasokan, dan merusak dasar kerja sama internasional yang lebih stabil (Alifia Sekar Kinanti et al., 2025).

2.2.2 Anatomi Proteksionisme Modern: Membedakan antara *Tariff Barriers* dan *Non-Tariff Barriers*.

Perdagangan internasional di era globalisasi ini tidak hanya dihadapkan pada adanya kebijakan tarif, tetapi juga pada munculnya kebijakan nontarif yang semakin tersebar luas dan diterapkan di beberapa negara. *Tariff barriers* dan *non-tariff barriers* (NTBs) adalah dua jenis utama hambatan dalam sistem perdagangan dalam kebijakan proteksionisme modern. *Tariff barriers* merujuk pada kebijakan di mana pemerintah membebani barang impor dengan pajak atau bea masuk, sehingga harga barang asing menjadi lebih mahal dan kurang kompetitif dibandingkan dengan produk domestik. Secara umum, hal tersebut guna melindungi industri dalam negeri, menjaga lapangan kerja serta menghasilkan penerimaan negara. Sedangkan *non-tariff barriers* mencakup segala jenis pembatasan dalam perdagangan yang bukan berupa tarif, seperti kuota, izin impor, atau kriteria mutu produk, meskipun tidak berupa pungutan pajak. Namun, hambatan tersebut dapat berdampak pada pergerakan barang dan layanan antarnegara (Cornelia Lyman, 2023).

Dalam konteks proteksionisme modern, negara-negara cenderung lebih banyak mengandalkan hambatan non-tarif (NTBs) karena instrumen ini lebih fleksibel, bisa diatur secara teknis, dan terlihat lebih “halus” dibandingkan dengan kenaikan tarif yang terang-terangan dan mudah diangkat sebagai pelanggaran aturan WTO. NTBs

memungkinkan pemerintah membatasi impor tanpa menaikkan bea masuk, misalnya lewat standar teknis, regulasi lingkungan, atau prosedur administratif yang memperumit akses pasar. Contoh konkret adalah larangan atau pembatasan impor produk tertentu dengan alasan lingkungan, penurunan emisi, atau standar ESG yang pada praktiknya sering menjadi kendaraan proteksionisme terselubung. Selain itu, boikot korporasi atau kampanye ekonomi-politik terhadap perusahaan tertentu dimanfaatkan sebagai instrumen tekanan tanpa memakai tarif resmi, sehingga lebih sulit dipantau dan diuji melalui mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan. Di sisi lain, pembatasan arus investasi strategis khususnya di sektor teknologi, pertahanan, dan infrastruktur kritis dijadikan sarana pelindung kedaulatan nasional sekaligus perangkat proteksionisme modern yang mengarahkan arus modal dan teknologi sesuai kepentingan politik domestik (Marco Fugazza et al., 2025).

2.2.3 Teori Neo-Merkantilisme dalam Hubungan Internasional: Dasar pemikiran negara hegemon yang cenderung bersikap proteksionis dan menganggap ekonomi global sebagai arena persaingan yang bersifat *zero-sum game*.

Neo-Merkantilisme merupakan teori ekonomi politik yang mengintegrasikan prinsip-prinsip merkantilisme klasik dengan unsur-unsur baru yang sesuai dengan keadaan ekonomi global saat ini. Dalam teori ini, negara dianggap sebagai aktor utama yang perlu mengintervensi perekonomian untuk mengoptimalkan kekuatan nasional. Tidak seperti Merkantilisme klasik yang hanya memusatkan perhatian pada penumpukan emas, Neo-Merkantilisme lebih menekankan pada kebijakan negara yang

terintegrasi untuk mengendalikan impor dan mendorong ekspor yang strategis. Negara memakai berbagai alat proteksionisme seperti pajak, kuota, dan hambatan nontarif untuk menjaga industri lokal dari kompetisi internasional. Konsep ini sangat penting untuk memahami mengapa negara besar sering bersikap proteksionis dalam interaksi internasional (Andhika Fachrell, 2024).

Dasar pemikiran Neo-Merkantilisme berlandaskan pada keyakinan bahwa sistem internasional adalah anarkis tanpa adanya otoritas tertinggi yang mengatur hubungan antarnegara. Dalam jenis sistem seperti ini, keamanan tidak terjamin, sehingga setiap negara harus bergantung pada diri sendiri untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Ekonomi global dianggap sebagai bidang persaingan di mana manfaat satu negara berarti kerugian bagi negara lainnya. Maka, transaksi ekonomi global dianggap sebagai *zero-sum game* yang tidak dapat menguntungkan semua pihak sekaligus. Anggapan ini mendorong negara-negara besar untuk menerapkan kebijakan proteksionis guna melindungi kepentingan ekonominya (Kenneth A. Reinert, 2024).

Negara-negara besar atau hegemon biasanya bersikap proteksionis karena mereka memiliki dua alasan utama dalam menjalankan kebijakan perdagangan. Motif utamanya berupa efisiensi ekonomi, yang diterapkan pada negara-negara besar yang memiliki pengaruh besar terhadap harga di pasar global. Motif kedua bersifat redistributif atau berkaitan dengan politik, di mana perlindungan perdagangan memberikan keuntungan politik yang lebih signifikan dibandingkan dengan kerugian ekonomi akibat penutupan pasar. Melalui penerapan tarif dan kendala perdagangan, negara hegemon mampu melindungi sektor industri lokal yang sedang tumbuh dari

persaingan yang tidak adil. Mereka pun memanfaatkan kekuatan ekonomi sebagai alat strategis untuk mencapai sasaran politik dan menjaga dominasi global mereka (Retno Ayu Debora M et al., 2014).

Kekuatan ekonomi telah menjadi dasar utama dalam menetapkan posisi strategis suatu negara dalam sistem politik global saat ini. Negara dengan ekonomi yang kokoh dapat menyebarkan pengaruhnya ke luar negeri melalui berbagai alat kebijakan perdagangan dan investasi. Dalam perspektif Neo-Merkantilisme, ekspor dipandang sebagai “menang” karena mendatangkan uang ke negara, sedangkan impor dianggap “kalah” karena mengeluarkan uang. Hal ini mendorong negara untuk terus berupaya mencapai surplus perdagangan dan menghindari defisit yang dianggap mengancam keamanan negara. Kebijakan seperti “America First” yang diterapkan oleh Donald Trump menunjukkan pelaksanaan prinsip neomarkantilisme ini dalam realitas (Budi Sutrisno, 2025).

Kebijakan proteksionisme oleh Neo-Merkantilisme meliputi berbagai alat seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu tarif yang tinggi, kuota untuk impor, serta hambatan nontarif yang rumit. Alat-alat ini digunakan untuk melindungi industri baru atau *industri yang masih bayi* yang belum siap bersaing dengan perusahaan asing yang telah berpengalaman. Negara juga menerapkan kebijakan ini untuk mendorong industrialisasi dengan memberikan subsidi dan dukungan pemerintah pada sektor-sektor strategis tertentu. Di era globalisasi, neomerkantilisme masih memiliki relevansi karena persaingan ekonomi antara negara semakin ketat dan tidak seimbang.

2.3 Dinamika Hubungan Dagang Ketika Perang Dagang AS-China (Periode 2019–2025)

2.3.1 Sejarah Singkat Interdependensi AS-China

Keterkaitan ekonomi antara Amerika Serikat dan China bermula setelah hubungan diplomatik dinormalisasi pada 1 Januari 1979 di bawah kepemimpinan Jimmy Carter dan Deng Xiaoping, yang memungkinkan terjadinya kerja sama perdagangan bilateral. Sejak reformasi ekonomi China tahun 1978, negara itu memerlukan pasar ekspor yang luas untuk barang-barang manufakturnya, dan Amerika Serikat menjadi sasaran utama karena tingginya konsumsi domestiknya. Di sisi lain, Amerika Serikat memerlukan barang manufaktur murah dari China untuk memenuhi permintaan konsumen dan menjaga inflasi tetap rendah, menciptakan ketergantungan yang saling menguntungkan. Volume perdagangan antara kedua negara meningkat pesat, mencapai puncaknya pada pertengahan tahun 2000-an ketika kinerja perdagangan China menyumbang hingga 64% dari PDB nasionalnya (Big Alpha, 2021).

Interdependensi ini awalnya hanyalah berupa simbiosis mutualisme, di mana China memperoleh cadangan devisa yang signifikan dari ekspor Amerika Serikat, sedangkan Amerika Serikat menikmati barang-barangnya dengan harga terjangkau dan pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran rumah tangga. China membeli surat utang pemerintah Amerika Serikat untuk mempertahankan stabilitas nilai Yuan dan mendukung ekspor, dengan total kepemilikan utang Amerika Serikat mencapai 1.074,4 miliar USD pada Juni 2020. Amerika Serikat juga tergantung pada China dalam rantai

pasok global, terutama untuk barang elektronik seperti smartphone dan komputer yang memberikan kontribusi seperempat dari total impor Amerika Serikat dari China. Namun, defisit neraca perdagangan Amerika Serikat terhadap China terus bertambah, mencapai angka tertinggi sebesar 419,2 miliar USD pada tahun 2018. Ketidakseimbangan ini menjadi salah satu penyebab konflik karena Amerika Serikat beranggapan China menerapkan praktik perdagangan tidak adil seperti subsidi pemerintah dan pemaksaan pemindahan teknologi (Muhammad Aditya, 2025).

Seiring berjalannya waktu, hubungan yang awalnya saling membutuhkan bertransformasi menjadi persaingan yang tidak sehat saat China mulai menentang dominasi Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi dan militer terbesar di dunia. Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump pada tahun 2017 secara jelas menyebut China sebagai pesaing strategis yang berusaha mengubah posisi kekuatan Amerika Serikat lewat ambisi di bidang perdagangan dan investasi infrastruktur. Rata-rata pertumbuhan PDB China sebesar 9,10% per tahun (2002-2019) jauh melampaui Amerika Serikat yang hanya 2,04%, yang membuat Washington khawatir akan pergeseran kekuatan global. China pun secara signifikan memperbesar anggaran militernya, mencapai 178,6 miliar USD pada 2020, yang dianggap oleh Amerika Serikat sebagai risiko keamanan. Amerika Serikat selanjutnya menerapkan tarif impor sebesar 25% pada barang senilai 550 miliar USD dari China mulai tahun 2018, menandakan perubahan dari kerja sama ke konfrontasi perdagangan (Muhammad Aditya, 2025).

Perang dagang yang secara resmi dimulai pada tahun 2018 terus meningkat dan berubah hingga 2025, dengan Amerika Serikat mengenakan tarif impor sampai 145% dan China merespons dengan tarif 125%. Konflik ini beralih dari hanya ketidakseimbangan dagang menjadi persaingan struktural dan strategis yang meluas ke bidang teknologi, investasi, dan geopolitik. China mulai menjanjikan rekan perdagangan baru dan mengurangi ketergantungan terhadap Amerika Serikat, dengan lonjakan ekspor ke ASEAN sebesar 57% dan ke Eropa sebesar 14% pada 2024-2025. Tetapi, ketergantungan timbal balik tetap penting karena kedua negara ini akan terus meraih keuntungan besar dari perdagangan ini. Dinamika ini menunjukkan bahwa interdependensi ekonomi yang dulunya menguntungkan kini beralih menjadi sumber kerentanan strategis bagi kedua negara (Asep Setiawan, 2025).

2.3.2 Eskalasi Tarif dan Pergeseran ke Perang Teknologi (*Tech War*)

Perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang dimulai pada 2018 mengalami peningkatan yang signifikan hingga 2025, di mana tarif impor Amerika Serikat untuk China mencapai puncaknya sebesar 145% pada April 2025, sementara China merespons dengan tarif 125%. Konflik yang dimulai dengan komoditas konvensional seperti kedelai, baja, dan aluminium perlahan-lahan berubah menjadi persaingan dalam teknologi tinggi sejak 2019. China yang menguasai 95% dari pasokan logam tanah jarang global mulai memanfaatkan mineral ini sebagai alat strategis, sementara Amerika Serikat membalas dengan larangan ekspor komponen semikonduktor canggih serta perangkat lunak desain sirkuit. Pada Oktober 2022, pemerintahan Biden menerbitkan regulasi yang melarang perusahaan teknologi

Amerika Serikat yang mendapatkan dana federal untuk membangun fasilitas di China selama 10 tahun, dalam rangka program CHIPS Act senilai 50 miliar USD. Amerika Serikat juga menekan Nvidia dan AMD untuk menghentikan penjualan chip AI ke China, membatasi akses Beijing pada teknologi kecerdasan buatan yang paling canggih (Rehan Oktra Halim, 2025).

Perhatian konflik beralih ke penguasaan pasokan global mineral tanah jarang yang menjadi bahan esensial bagi manufaktur teknologi canggih dan sektor 5G, di mana Amerika Serikat melarang Huawei dan ZTE dari jaringan Amerika Serikat karena masalah keamanan nasional. Pada Mei 2025, negosiasi dua pihak di Jenewa menghasilkan kesepakatan untuk mengurangi tarif selama 90 hari, di mana tarif Amerika Serikat menurun dari 145% menjadi 30% dan tarif China berkurang dari 125% menjadi 10%. Namun, ketegangan kembali meningkat pada Oktober 2025 dengan ancaman tarif 100% dan konflik dagang saat negara-negara besar, terutama Amerika Serikat dan China, saling berebut kendali serta membatasi pasokan 17 unsur mineral penting yang bersifat sangat vital untuk teknologi, seperti kendaraan listrik hingga peralatan militer, sampai akhirnya pada Mei 2026 kedua negara mengonfirmasi perjanjian baru yang mencakup pengaturan ekspor *rare earth* dan pelanggaran batasan teknologi. Pertikaian yang berawal dari masalah kedelai dan baja kini telah berkembang menjadi persaingan strategis yang kompleks di bidang teknologi tinggi, mengubah peta kekuatan teknologi global serta rantai pasokan digital dunia. Kedua negara terus terperangkap dalam ketergantungan satu sama lain yang menyebabkan kerentanan strategis bagi kedua belah pihak (Asep Setiawan, 2025).

2.3.3 Era Ketidakpastian Global (*Global Uncertainty*)

Konflik antara Amerika Serikat dan China, bersama dengan guncangan pasca-pandemi COVID-19 dan ketegangan geopolitik di Eropa Timur serta Timur Tengah, telah menyebabkan fragmentasi geoekonomi global yang signifikan sejak 2018. Jumlah pembatasan perdagangan dan investasi asing langsung (FDI) telah meningkat tiga kali lipat sejak tahun 2018, sementara pola perdagangan berubah karena banyak perusahaan yang bereaksi terhadap ketidakpastian kebijakan dan berupaya melindungi rantai pasokan dari risiko geopolitik. FDI semakin terfokus di negara-negara dengan kesamaan geopolitik melalui praktik friend-shoring, yang membagi ekonomi global menjadi blok-blok yang berbeda. Situasi global saat ini mengalami tekanan geopolitik dan geoekonomi yang menyebabkan hubungan erat antara ekonomi, keamanan, dan teknologi, menghasilkan era ketidakpastian yang luar biasa. Fragmentasi ini semakin parah akibat perang dagang Amerika Serikat dan China yang dimulai pada 2018, di mana ekspor China ke Amerika Serikat menurun 52% karena berkurangnya volume perdagangan bilateral (Bayu Saputra, 2023).

Dunia kini terbagi menjadi beberapa blok ekonomi dengan Amerika Serikat dan sekutunya membentuk satu blok, sementara Tiongkok memperkuat hubungan dengan ASEAN. Konflik dagang antara Amerika Serikat dan China tidak hanya berdampak pada kedua negara, tetapi juga mengguncang kawasan Asia-Pasifik karena kawasan ini sangat terintegrasi dalam rantai pasok global, terutama dalam industri manufaktur dan teknologi. Indonesia mendapat peluang relokasi dan peralihan perdagangan dari China dan Amerika Serikat di tengah pergeseran situasi ekonomi politik global, namun

juga menghadapi risiko perlambatan ekonomi dengan pertumbuhan turun dari 5,17% pada 2018 menjadi 5,02% pada 2019. Muncul juga fenomena *green competitiveness* dan *green trade* yang berpotensi pada ekspor *green goods* dan teknologi, menambah dimensi baru dalam fragmentasi ekonomi global. Ketegangan geopolitik di Asia-Pasifik berisiko menciptakan ketidakstabilan politik dan ekonomi di kawasan, bahkan dapat memicu konflik proxy yang memperdalam fragmentasi ekonomi dunia (Muh Nur Alifath et al., 2025).

2.4 Saluran Transmisi ke Negara Berkembang

2.4.1 Saluran Transmisi Perdagangan (*Trade Channels*)

Saluran perdagangan merupakan cara utama bagaimana dampak dari konflik antara Amerika Serikat dan China dapat memengaruhi Indonesia melalui dua cara yang berbeda. Pengalihan perdagangan terjadi ketika Indonesia mendapatkan kesempatan untuk memasuki pasar yang ditinggalkan oleh China atau Amerika Serikat karena tarif bilateral yang tinggi. Maka, Indonesia dapat mengisi celah pasokan tertentu di pasar global. Contohnya, ketika Amerika Serikat memberlakukan tarif tinggi terhadap barang-barang dari China, beberapa pembeli di Amerika Serikat mulai mencari Indonesia sebagai opsi lain untuk produk tekstil, perabotan, dan komponen elektronik. Sebaliknya, pelemahan perdagangan terjadi ketika ekspor bahan baku Indonesia turun karena permintaan global yang lemah akibat perlambatan ekonomi di China dan penurunan aktivitas manufaktur di seluruh dunia (Purwono R et al., 2021).

Sekitar 41% ekspor Indonesia terhubung dengan jaringan produksi global, dengan Amerika Serikat dan China sebagai mitra dagang utama. Maka, ketika terjadi penurunan dalam volume perdagangan antara kedua negara tersebut, dampaknya tidak langsung terhadap Indonesia. Kehancuran perdagangan juga terlihat dari penurunan ekspor secara tidak langsung dari Indonesia sebesar 300 juta USD akibat tarif China pada produk dari Amerika Serikat. Sektor yang paling terpengaruh mencakup komputer, elektronik, peralatan listrik, tekstil, dan kimia untuk ekspor China ke Amerika Serikat, serta sektor transportasi, kimia, dan pertanian untuk ekspor Amerika Serikat. Perang dagang secara bersamaan memengaruhi ekspor, impor, suku bunga, dan inflasi di Indonesia dengan dampak yang cukup besar pada ekspor, impor, dan suku bunga (Purwono R et al., 2021).

2.4.2 Saluran Transmisi Finansial dan Investasi (*Financial & Investment Channels*)

Saluran keuangan dan investasi merupakan cara kedua di mana perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok menimbulkan efek domino di Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi melalui nilai tukar, arus modal, dan relokasi rantai pasokan global. Perang dagang menyebabkan perubahan nilai tukar mata uang karena meningkatnya ketidakpastian global yang menyebabkan investor menghindari aset berisiko tinggi, termasuk mata uang dari negara-negara berkembang seperti rupiah. Maka, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi lebih tidak stabil dan cenderung melemah. Lalu, ketika terjadi tekanan tambahan terhadap nilai tukar dan

pasar saham di Indonesia, hal tersebut dapat dilihat ketika sentimen investor memburuk akibat ketegangan geopolitik atau negara-negara maju mulai menarik likuiditas serta terjadinya arus keluar modal dari negara-negara berkembang (Erwanto Khusuma, 2026).

Perang dagang juga mendorong tren *supply chain decoupling*. Perusahaan multinasional akan memindahkan pusat produksinya dari China ke negara lain untuk menghindari tarif tinggi. Indonesia mendapatkan keuntungan dari relokasi ini karena memiliki tenaga kerja yang murah dan pasar domestik yang besar, serta menarik *Foreign Direct Investment* (FDI) dari perusahaan-perusahaan yang ingin memperluas rantai pasokan mereka. Namun, kebijakan ini juga membawa risiko karena Indonesia harus bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia untuk menarik investasi yang sama. Selain itu, telah didefinisikan juga oleh *International Monetary Fund* (IMF) bahwa kebijakan tersebut bisa dikatakan sebagai salah satu *spillover effect*. Lalu, peristiwa perang dagang antara Amerika Serikat dan China dalam kasus Indonesia dapat menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan dari kedua negara tersebut telah secara nyata memengaruhi kondisi makroekonomi domestik melalui *Trade Channels* serta *Financial & Investment Channels* (Lilie Nur Sulistiyowati et al., 2023).

2.5 Perekonomian Amerika Serikat, China, dan Indonesia 2019-2025

2.5.1 Amerika Serikat

Bangsa Amerika Serikat telah menganut beberapa prinsip dasar sebagai pendekatan hubungan ekonomi sejak awal abad ke-21. Pertama dan yang paling penting, Amerika Serikat tetap menganut perekonomian pasar. Masyarakat Amerika Serikat terus mempercayai bahwa perekonomian pada umumnya mengusahakan yang terbaik ketika keputusan tentang produk dan harga barang dibuat melalui mekanisme *give-and-take* (US Department of State, 1981, hlm. 4). Kebijakan “America First” yang diproklamasikan oleh Presiden Donald Trump, merupakan doktrin politik dan ekonomi yang menempatkan kepentingan nasional Amerika Serikat sebagai prioritas utama dalam semua pengambilan keputusan pemerintah, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional (Kari Heerman, 2026).

Kebijakan “America First” menjadi landasan utama masa kepresidenan Trump dari tahun 2017 hingga 2021 dan menjadi dasar platform politiknya untuk masa jabatan mendatang. Dalam praktiknya, kebijakan ini diwujudkan melalui sikap proteksionis dalam perdagangan internasional, seperti penetapan tarif tinggi terhadap barang-barang impor dari China dan negara-negara lain yang dianggap merugikan industri dalam negeri. Pendekatan proteksionis dalam perdagangan ini diperkirakan tidak akan banyak berubah pada masa jabatan kedua Trump sebagai presiden. Tujuan dari kebijakan proteksionis adalah untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri, dan mendorong kemandirian ekonomi AS. Secara konseptual, kebijakan ini sejalan dengan slogan “America First”, namun dikhawatirkan akan

memicu tindakan balasan dari mitra dagang utama dan berpotensi menimbulkan ketegangan ekonomi global (Kari Heerman, 2026).

Gagasan proteksionis Trump diterapkan sepenuhnya pada masa jabatan keduanya. Namun, hal tersebut berpotensi secara signifikan mengubah pola perdagangan internasional dan merongrong sistem perdagangan bebas yang telah lama menjadi fondasi ekonomi global. Selanjutnya, perang dagang antara Amerika Serikat dan China selama pemerintahan Trump dimulai ketika AS merasa khawatir atas defisit perdagangan yang sangat besar dengan Tiongkok serta tuduhan praktik perdagangan yang tidak adil, seperti pencurian kekayaan intelektual, subsidi pemerintah yang tidak adil, dan manipulasi mata uang (Kari Heerman, 2026). Maka, kebijakan “America First” tidak hanya berlanjut, tetapi juga menjadi kerangka kebijakan yang lebih terstruktur dan radikal pada periode kedua Donald Trump dengan dampak langsung pada perang dagang antara Amerika Serikat dan China, fragmentasi rantai pasok global, dan tekanan pada negara berkembang seperti Indonesia.

Pada tahun 2019, pertumbuhan PDB riil Amerika Serikat melambat, hanya tumbuh 2,1% yoy pada TW3-2019 dari 2,3% pada TW2-2019, yang merupakan laju terendah sejak TW2-2017. Pelemahan investasi yang cukup tajam disertai moderasi konsumsi dan pengeluaran pemerintah menurunkan kinerja ekonomi Amerika Serikat. Pertumbuhan ekspor yang sedikit membaik tidak dapat mengompensasi penurunan komponen PDB lainnya. Ketegangan perdagangan diliputi ketidakpastian, realisasi tambahan tarif impor, retaliasi China, serta penundaan tarif yang mewarnai perjalanan negosiasi perdagangan. Amerika Serikat mengenakan tambahan tarif impor 15%

terhadap produk China senilai USD 112 miliar, efektif 1 September 2019. China segera melakukan retaliasi dengan menaikkan tarif produk impor dari Amerika Serikat. Namun, sebagai itikad baik atas upaya negosiasi phase one deal yang masih bergulir, Amerika Serikat menunda kenaikan tarif dari 25% menjadi 30% terhadap impor China senilai USD 250 miliar. Sebagai kompensasi, China berkomitmen untuk meningkatkan pembelian produk agrikultur dari Amerika Serikat (Bank Indonesia, 2019).

Pada tahun 2020, kondisi ekonomi Amerika Serikat mengalami kontraksi yang signifikan ketika pandemi COVID-19 parah. GDP riil menunjukkan angka -2,16%. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 memicu kontraksi ekonomi yang tajam sebesar sekitar 2,2% karena kebijakan lockdown, penutupan usaha, dan gangguan pada rantai pasokan global berdampak parah terhadap aktivitas ekonomi. Pemerintah federal merespons dengan paket stimulus fiskal yang ekspansif, seperti Undang-Undang CARES (*Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act*). Lalu, *Federal Reserve* menerapkan kebijakan moneter yang agresif, termasuk suku bunga mendekati nol dan pembelian aset berskala besar, untuk menstabilkan pasar keuangan dan mendukung pemulihan (Ananya Bhalla, 2025).

Pada tahun 2021, ekonomi Amerika Serikat terlihat pulih kembali secara signifikan. Mencatatkan tingkat pertumbuhan PDB yang luar biasa sebesar 5,8%, salah satu yang tertinggi dalam beberapa dekade terakhir. Lonjakan ini didorong oleh belanja konsumen yang kuat, percepatan program vaksinasi, dan pembukaan kembali berbagai usaha. Namun, pertumbuhan pesat ini juga turut menyebabkan kenaikan inflasi yang kemudian menjadi perhatian utama pada tahun-tahun berikutnya. Lalu, pada tahun

2022, tekanan inflasi diperparah oleh kemacetan rantai pasokan, kekurangan tenaga kerja, dan ketegangan geopolitik seperti invasi Rusia ke Ukraina, yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan menjadi 1,9%. Federal Reserve menanggapi hal ini dengan meluncurkan serangkaian kenaikan suku bunga untuk menekan inflasi, yang memang memperlambat pertumbuhan ekonomi, namun membantu mencegah lonjakan harga yang tak terkendali (Ananya Bhalla, 2025).

Pada tahun 2023, pertumbuhan PDB sedikit meningkat menjadi 2,5% seiring meredanya tekanan inflasi dan penyesuaian rantai pasokan. Perekonomian menunjukkan pertahanan yang didukung oleh pasar tenaga kerja yang kuat dan permintaan konsumen yang stabil. Selanjutnya, pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi stabil di angka sekitar 2,8% dengan laju pertumbuhan tahunan pada kuartal ketiga yang cukup menonjol, yaitu 3,1%. Hal ini sebagian besar didorong oleh investasi bisnis yang kuat, peningkatan belanja pemerintah untuk infrastruktur, serta kepercayaan konsumen yang tetap tinggi, meskipun biaya pinjaman meningkat akibat kenaikan suku bunga (Ananya Bhalla, 2025).

Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat naik ke tingkat tertinggi dalam dua tahun, mencapai 3,8% pada kuartal II/2025 (dihitung secara tahunan). Pertumbuhan ini didorong oleh belanja konsumen yang meningkat 2,5% dan investasi bisnis yang tumbuh pesat 7,3%, terutama di bidang *Artificial Intelligence*. Investasi dalam pusat data, yang digunakan untuk mendukung infrastruktur *Artificial Intelligence*, mencapai rekor baru dengan nilai lebih dari 40 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Angka ini lebih besar dari perkiraan awal sebesar 3,3% dan menunjukkan pemulihan yang

signifikan setelah perekonomian Amerika Serikat mengalami penurunan pada kuartal pertama tahun 2025 karena lonjakan impor yang besar menjelang penetapan tarif oleh Presiden Donald Trump. Prospek di kuartal III/2025 terlihat kuat, dengan *Federal Reserve Bank of Atlanta* memperkirakan pertumbuhan PDB pada kuartal III mencapai 3,3%. Pertumbuhan ini didukung oleh belanja konsumen yang masih kuat serta peningkatan pengeluaran bisnis untuk peralatan. Namun, beberapa ekonom lebih berhati-hati terhadap kuartal IV karena pertumbuhan tenaga kerja yang lemah bisa mengurangi belanja konsumen. Meskipun pertumbuhan ekonomi masih kuat, inflasi tetap menjadi isu yang perlu diperhatikan. Indeks *Personal Consumption Expenditures* (PCE) telah direvisi naik menjadi 2,6% pada kuartal II/2025, dan data PCE bulan Agustus diprediksi menunjukkan kenaikan hampir mencapai 3% secara tahunan. Namun, hal ini belum tentu membuat *The Fed* langsung mengurangi suku bunga dalam dua pertemuan terakhir tahun ini (Lorenzo Anugrah Mahardika, 2025).

Secara keseluruhan, perekonomian Amerika Serikat dari 2019 hingga 2025 berfluktuasi dengan pola yang berubah-ubah, dipengaruhi oleh kebijakan dalam negeri dan peristiwa internasional. Pada 2019 ada perlambatan karena ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan China. Tahun 2020 mengalami penurunan tajam akibat wabah virus COVID-19. Pada tahun 2021–2022 ada pemulihan yang kuat. Tahun 2023-2024 berlangsung normalisasi dengan tingkat inflasi yang tinggi. Sementara itu, tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, tetapi tetap perlu diwaspadai, didukung oleh belanja masyarakat dan investasi besar di bidang *Artificial Intelligence* (AI). Di tengah berbagai hal tersebut, doktrin "America First" yang diperkenalkan oleh

Donald Trump sejak tahun 2017 tetap menjadi dasar kebijakan ekonomi Amerika Serikat yang justru semakin diperkuat pada periode kedua masa kepresidenannya dari 2025 hingga sekarang melalui pendekatan proteksionis yang lebih rapi dan ekstrem, seperti pengenalan tarif balasan terhadap China, peningkatan keamanan rantai pasokan, serta fokus pada investasi di dalam negeri. Hal ini secara langsung memperburuk fragmentasi perdagangan internasional dan menambah tekanan terhadap negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pada 2021 menunjukkan pemulihan aktivitas ekonomi dan peningkatan permintaan global setelah pandemi, yang dapat membuka peluang bagi ekspor Indonesia sekaligus memperlihatkan ketergantungan terhadap pasar eksternal. Kondisi tersebut semakin menunjukkan kerentanan eksternal ketika pada 2022 peningkatan inflasi mendorong kenaikan suku bunga AS yang berpotensi memengaruhi arus modal, nilai tukar, dan kondisi ekonomi Indonesia. Di sisi lain, peningkatan investasi AS pada sektor kecerdasan buatan menunjukkan bahwa persaingan Amerika Serikat dan China berkembang dari perdagangan barang menuju teknologi dan industri strategis. Dinamika tersebut menegaskan pentingnya *Self-Reliance* bagi Indonesia melalui diversifikasi pasar serta penguatan kapasitas industri dan teknologi domestik agar tidak hanya bergantung pada pasar, teknologi, maupun peran sebagai pemasok bahan mentah dalam menghadapi perubahan ekonomi global.

2.5.2 China

Dunia telah menyaksikan kebangkitan China yang terus-menerus selama empat dekade terakhir, berhasil mengangkat ratusan juta orang keluar dari kemiskinan absolut. China telah bertransformasi dari negara miskin menjadi negara dengan pendapatan menengah atas selama dua dekade terakhir. Sudah menjadi rahasia umum bahwa perdagangan telah memainkan peran krusial dalam perjalanan China menuju kemakmuran. Pangsa China dalam perdagangan global telah meningkat dari kurang dari 1% pada tahun 1970-an menjadi sekitar 15% hingga saat ini, dan sejak tahun 2010, China telah menjadi negara dengan pangsa terbesar dalam total impor dan ekspor barang di seluruh dunia (Razieh Zahedi et al., 2022).

Sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia, China terlalu besar untuk dapat menghasilkan pertumbuhan yang signifikan dari ekspor, dan terus bergantung pada pertumbuhan yang didorong oleh ekspor berisiko memperparah ketegangan perdagangan global. Ditambah lagi dengan tantangan berupa melambatnya pertumbuhan produktivitas, tingginya tingkat utang korporasi dan utang publik, menurunnya imbal hasil investasi, serta populasi yang menua. Secara keseluruhan, faktor-faktor ini mengindikasikan pertumbuhan yang lebih lambat ke depannya. Dengan latar belakang tersebut, pihak berwenang telah memprioritaskan peningkatan konsumsi sebagai pendorong pertumbuhan. Mereka juga menyadari pentingnya mengalihkan fokus ekonomi dari sektor barang ke sektor jasa (Kristalina Georgieva, 2025).

Peralihan ke sektor konsumsi merupakan prioritas kebijakan utama bagi China. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan konsumsi domestik. Mereka telah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif, melonggarkan kebijakan moneter, serta melaksanakan sejumlah langkah terarah untuk mengatasi involusi. Mereka secara bertahap menaikkan usia pensiun, yang akan membantu memperluas pasokan tenaga kerja dan meningkatkan prospek pertumbuhan dalam jangka menengah. Selain itu, mereka juga telah menaikkan subsidi bagi para lansia untuk layanan penitipan anak guna mendorong pertumbuhan sektor jasa (Kristalina Georgieva, 2025).

Secara umum, tren pertumbuhan ekonomi China pada tahun 2019-2025 menunjukkan perlambatan struktural. Data resmi menunjukkan bahwa perekonomian China tumbuh sebesar 6,1% pada tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya, angka terburuk dalam 29 tahun terakhir. Negara tersebut menghadapi permintaan domestik yang lemah serta dampak dari perang dagang yang sengit dengan Amerika Serikat. Selama dua tahun terakhir, pemerintah telah meluncurkan berbagai langkah dalam upaya untuk mendorong pertumbuhan. Hal ini terjadi setelah hampir dua tahun ketegangan perdagangan dengan Amerika Serikat, meskipun harapan akan hubungan yang lebih baik dengan Amerika Serikat telah membawa perbaikan pada data sektor manufaktur dan tingkat kepercayaan pada dunia usaha (BBC News, 2020).

Terdapat penurunan hingga pemulihan ekonomi China pasca wabah awal COVID-19 dalam kecepatan normalisasi sektor-sektor ekonomi setelah pelonggaran *lockdown*. Terdapat perbandingan pola pemulihan antara sektor industri dan jasa serta

dampak permintaan global, di mana pada tahun 2020 aktivitas ekonomi China sempat anjlok ke titik terendah hingga hanya beroperasi sekitar 20% dari kapasitas normal pada Februari akibat *lockdown* ketat. Namun, *rebound* berhasil secara impresif hingga 90% pada bulan Mei. Pemulihan tersebut berlangsung tidak seimbang karena sektor industri dan manufaktur pulih jauh lebih cepat setelah produksi dibuka kembali. Di sisi lain, sektor jasa bergerak lambat akibat pembatasan mobilitas, kekhawatiran infeksi, dan rendahnya kepercayaan konsumen. Namun, pemulihan pertengahan tahun 2020 yang didorong oleh permintaan domestik swasta serta stimulus fiskal dan moneter pemerintah ini sempat tertahan oleh melemahnya permintaan ekspor akibat mitra dagang utama di Eropa dan Amerika baru mulai menerapkan *lockdown* (Alexander Al-Haschimi et al., 2020).

Lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi secara lokal hingga diluncurkannya vaksin yang efektif dapat dikendalikan dengan baik dan tidak akan menimbulkan gangguan besar terhadap aktivitas ekonomi di China. Dalam skenario tersebut, pemulihan perekonomian China bisa dikatakan *rebound* pada tahun 2021 seiring dengan meluasnya aktivitas ekonomi ke sektor investasi swasta dan konsumsi sebagai respons terhadap meningkatnya kepercayaan konsumen dan pelaku usaha serta membaiknya kondisi pasar tenaga kerja. Prospek ini didasarkan pada dimulainya kembali reformasi struktural di China yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan mendukung pengeluaran investasi swasta (China Economic Update, 2020). Lalu, terbukti berdasarkan data dari *National Bureau of*

Statistics of China, GDP China pada tahun 2021 meningkat secara signifikan hingga menyentuh angka 8,6% secara tahunan (National Bureau of Statistics of China, 2026).

Pada tahun 2021, China terbukti mengalami *economic rebound* yang kuat. Namun, selama kuartal pertama dan kedua tahun 2022, terjadi dua gangguan besar secara bersamaan. Guncangan pertama yaitu varian COVID-19 yang saat itu lebih mudah menular dan memicu penerapan kebijakan *lockdown* yang lebih ketat lagi. Selanjutnya, pengetatan likuiditas bagi pengembang properti yang mengalami kesulitan, yang dimulai pada tahun 2021, terus memicu hilangnya kepercayaan hingga 2022. Pengembangan proyek mulai mengalami kesulitan dalam membayar tagihan, pembangunan terhenti, dan penjualan properti pun menurun. Dua guncangan besar tersebut memicu reaksi berantai yang signifikan yang berdampak pada sektor keuangan dan properti sepanjang tahun 2022 (IMF Country Report, 2026).

Pertumbuhan ekonomi China meningkat kembali menjadi 5,2% pada tahun 2023, naik dari 3% pada tahun 2022. Pemulihan ini sebagian besar disebabkan oleh normalisasi permintaan domestik pascapandemi COVID-19 serta efek basis. Hal ini juga didukung oleh pelonggaran kebijakan moneter dan fiskal yang dilakukan secara hati-hati dan bertahap sejak musim panas lalu. Namun, perekonomian China masih harus menghadapi sejumlah besar kerentanan yang kemungkinan besar akan terus berlanjut dalam jangka pendek. Secara khusus, sektor properti masih terpuruk dalam krisis besar, bahkan semakin memburuk pada akhir tahun 2023 (BNP PARIBAS, 2024). Sepanjang tahun 2023, tekanan deflasi mulai terlihat dan terus membesar, terutama sejak bulan Juli ketika inflasi konsumen memasuki fase negatif untuk pertama

kalinya sejak Februari 2021. Harga yang dibayar oleh konsumen turun 0,3% dibandingkan bulan Juli tahun sebelumnya, sementara harga yang diterima produsen berdasarkan Producer Price Index (PPI) mengalami penurunan terbesar sejak tahun 2016, yang menunjukkan bahwa permintaan dalam negeri masih rendah dan kapasitas produksi selalu tinggi. Deflasi semakin parah karena harga pangan turun 3% pada separuh akhir tahun 2023, harga properti perumahan juga turun, serta harga energi menurun dengan harga bahan bakar turun 5,1% sepanjang tahun. Meskipun deflasi biasanya terjadi saat ekonomi sedang dalam resesi, China mengalami deflasi meski sedang dalam tahap pemulihan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat masih rendah, meskipun sektor ekonomi mulai bergerak kembali (New Zealand Foreign Affairs and Trade, 2023).

Pada tahun 2024 sampai 2025, GDP China tumbuh sekitar 5% per tahun yang ditargetkan secara resmi oleh pemerintah China. Namun, tetap terdapat berbagai tantangan struktural yang cukup serius. Pertumbuhan tersebut sebagian besar didorong oleh ekspor yang solid, terutama dalam sektor kendaraan listrik, baterai, dan panel surya, serta dalam sektor manufaktur teknologi tinggi. Lalu, sektor konsumsi rumah tangga dan properti justru menunjukkan penurunan yang signifikan dengan harga rumah yang turun, penjualan yang merosot tajam serta banyak pengembang yang kesulitan memenuhi kewajiban utang. Hal ini berdampak pada penurunan kekayaan rumah tangga dan juga mengurangi pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari penjualan tanah (World Bank Group, 2025).

Secara keseluruhan, China bertransformasi dari negara miskin menjadi ekonomi terbesar kedua dunia dalam empat dekade dengan pangsa perdagangan global naik dari 1% (1970-an) menjadi 15% saat ini. Namun, model pertumbuhan berbasis ekspor semakin tidak berkelanjutan karena risiko ketegangan perdagangan dan tantangan struktural seperti produktivitas melambat, utang tinggi dan populasi menua, sehingga pemerintah beralih ke pertumbuhan berbasis konsumsi domestik. Pertumbuhan 2019–2025 menunjukkan perlambatan struktural dimulai dari 6,1% pada 2019 akibat perang dagang Amerika Serikat, lalu anjlok awal 2020 saat lockdown COVID-19 menurunkan aktivitas menjadi 20% dari kapasitas normal sebelum rebound ke 90% pada Mei 2020. Ekonomi tumbuh kuat 8,6% pada 2021, namun tertekan menjadi 3% pada 2022 akibat varian COVID-19 baru dan krisis properti yang memburuk. Pemulihan 5,2% terjadi pada 2023, didorong oleh normalisasi permintaan domestik, meski deflasi muncul sejak Juli dengan inflasi konsumen negatif pertama kali sejak 2021. Pada 2024-2025, GDP tumbuh 5% per tahun, ditopang oleh ekspor kendaraan listrik, baterai, dan panel surya, sementara properti dan konsumsi rumah tangga melemah, dengan harga rumah turun dan pengembang kesulitan membayar utang.

2.5.3 Indonesia

Perekonomian Indonesia pada 2019 menunjukkan ketahanan di tengah perlambatan ekonomi global, penurunan sejumlah harga komoditas, dan ketidakpastian perdagangan internasional. Namun, stabilitas makroekonomi tetap terjaga karena ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan permintaan domestik. Maka, bisa

dikatakan pada tahun tersebut perekonomian Indonesia cukup stabil sambil menghadapi tekanan eksternal. Selain itu, perekonomian Indonesia pada tahun 2019. Pertumbuhannya sebesar 5,02%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan sebesar 5,17% pada tahun 2018. Nilai GDP Indonesia mencapai sekitar Rp15.833,94 triliun, sedangkan GDP per kapita sekitar Rp59,1 juta atau 4.174,9 US dollar (Aktiva Primananda Hadiarta, 2020). Lalu, penurunan tingkat inflasi menjadi 2,72% menunjukkan bahwa stabilitas harga dan daya beli masyarakat terjaga dengan baik, sementara nilai tukar rupiah tetap berada dalam kondisi yang terkendali dan dapat ditangani melalui kebijakan fiskal dan moneter. Perekonomian juga didukung oleh sektor pertanian, perdagangan, industri pengolahan, jasa, dan konstruksi. Sektor pertanian merupakan sektor penting karena menyerap tenaga kerja terbanyak dan membantu menjamin ketahanan pangan. Namun, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti tekanan terhadap ekspor komoditas akibat turunnya harga dan permintaan global, maraknya pekerjaan di sektor informal, rendahnya tingkat produktivitas, serta masalah-masalah yang berkaitan dengan ketimpangan dan kemiskinan (Bappenas, 2019).

COVID-19 menjadi salah satu tantangan terbesar bagi perekonomian Indonesia ketika pada tahun 2020 virus tersebut menyebar secara global dan mulai berdampak langsung sejak awal tahun. Pembatasan sosial hingga mobilitas masyarakat, gangguan produksi, serta melemahnya perdagangan internasional yang disebabkan oleh perubahan regulasi yang semakin rumit menyebabkan aktivitas sirkulasi ekonomi Indonesia menurun secara signifikan. Selain itu, GDP riil Indonesia turun sebesar

2,07% dibandingkan dengan tahun 2019. Nilai GDP dengan harga konstan mencapai sekitar Rp10.722,44 triliun, sedangkan GDP dengan harga berjalan mencapai sekitar Rp15.434,2 triliun (BPS Indonesia, 2021). Pandemi memberikan dampak besar pada seluruh komponen GDP Indonesia, salah satunya adalah ekspor turun sekitar 7,70%, sedangkan impor turun sekitar 14,7%. Sektor transportasi, pariwisata, perdagangan, industri pengolahan, dan konstruksi merupakan yang paling terdampak, sementara sektor pertanian relatif stabil, meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal distribusi dan akses pasar. Dengan demikian, perekonomian Indonesia pada tahun 2020 ditandai oleh tingkat inflasi yang rendah, peningkatan angka pengangguran, dan melemahnya berbagai sektor ekonomi (Economic Report on Indonesia, 2020).

Pemulihan awal bagi perekonomian Indonesia akibat kontraksi pandemi COVID-19 terjadi pada tahun 2021. Aktivitas ekonomi mulai meningkat seiring berlanjutnya upaya vaksinasi, pelonggaran pembatasan pergerakan, pemulihan perdagangan global, serta penerapan berbagai kebijakan pemulihan nasional. Namun, pemulihan tersebut masih belum sepenuhnya stabil karena masih dipengaruhi oleh penyebaran varian Delta, pembatasan mobilitas, ketimpangan pemulihan antarsektor, dan ketergantungan terhadap ekspor komoditas. Pada tahun 2021, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 3,69%, yang merupakan peningkatan dibandingkan tahun 2020 ketika perekonomian mengalami kontraksi sebesar 2,07%. GDP saat ini mencapai sekitar Rp16.9708 triliun, sedangkan GDP per kapita sekitar Rp62,2 juta atau US\$4.349,5 (BPS Indonesia, 2022). Oleh karena itu, kondisi ekonomi Indonesia pada

2021 dapat disebut sebagai pemulihan positif, tetapi belum sepenuhnya kuat dan merata.

Tahun 2022 bisa dikatakan sebagai periode penting bagi perekonomian Indonesia setelah COVID-19. Aktivitas masyarakat bahkan dunia usaha kembali meningkat, mobilitas kembali normal, serta konsumsi dan perdagangan mengalami peningkatan walaupun sempat sedikit tertekan akibat berlangsungnya perang Rusia dan Ukraina. Pada tahun 2022, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,31%, yang merupakan peningkatan dibandingkan dengan pertumbuhan sebesar 3,69% pada tahun 2021. Berdasarkan harga saat ini, GDP Indonesia mencapai sekitar Rp 19,5884 triliun. GDP per kapita naik menjadi sekitar Rp 71 juta atau \$4.783,9 US dollar (BPS Indonesia, 2023). Perekonomian Indonesia tumbuh pada tahun 2022 terutama berkat pemulihan permintaan domestik dan meningkatnya aktivitas ekonomi setelah pelonggaran pembatasan pandemi. Meningkatnya mobilitas masyarakat mendorong konsumsi rumah tangga, perdagangan, transportasi, pariwisata, sektor restoran, serta berbagai kegiatan jasa. Bank Indonesia menyatakan bahwa pertumbuhan pada awal tahun 2022 didukung oleh peningkatan belanja konsumen, investasi nonkonstruksi, ekspor, serta meningkatnya mobilitas masyarakat (Bank Indonesia, 2022). Lalu, hal ini juga menunjukkan adanya kelemahan struktural yang mendalam. Pendapatan ekspor Indonesia sangat bergantung pada komoditas seperti batu bara, minyak sawit, produk pertambangan, dan komoditas primer lainnya, sehingga sangat rentan terhadap perubahan harga global dan permintaan dari negara-negara mitra dagang. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 harus dibarengi dengan diversifikasi

produk ekspor, penguatan industri pengolahan, serta peningkatan nilai tambah di dalam negeri (Bank Indonesia, 2022).

Indonesia pada tahun 2023 menjalani proses pemulihan kondisi ekonominya, tetapi sembari menghadapi perlambatan ekonomi global. Penurunan harga komoditas, melemahnya permintaan dari beberapa mitra dagang, serta kebijakan moneter yang lebih ketat memberikan tekanan pada ekspor dan investasi. Namun, konsumsi domestik, mobilitas masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta pemulihan sektor jasa terus menopang pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2023, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,05%, yang menunjukkan sedikit perlambatan dibandingkan dengan pertumbuhan sebesar 5,31% pada tahun 2022. GDP saat ini mencapai sekitar Rp20.8924 triliun, dengan GDP per kapita sekitar Rp 75 juta atau \$4.919,7 US dollar (BPS Indonesia, 2024).

Perekonomian Indonesia pada tahun 2024 mencoba tetap tumbuh stabil dan resilien sembari menghadapi tekanan dari faktor eksternal. Ekonomi global masih termasuk lambat sehingga berakibat pada penurunan harga beberapa komoditas serta melemahnya permintaan sejumlah negara mitra dagang. Pertumbuhan domestik masih ditopang oleh konsumsi masyarakat, investasi, belanja pemerintah, serta aktivitas sektor jasa dan industri. Perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,03% pada tahun 2024, yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan sebesar 5,05% yang tercatat pada tahun 2023. GDP saat ini berdasarkan harga berlaku mencapai sekitar Rp 22.139 triliun, sedangkan GDP per kapita mencapai sekitar Rp 78,6 juta atau \$4.960,3 US dollar (BPS Indonesia, 2025). Lalu, dalam aspek perdagangan

internasional, khususnya ekspor, hal tersebut masih memberikan kontribusi, terutama melalui ekspor barang-barang manufaktur, logam, besi dan baja, serta produk-produk pertambangan. Namun, ekspor menghadapi tekanan akibat turunnya harga beberapa komoditas utama dan melambatnya permintaan global. Jika bicara mengenai stabilitas harga pada tahun 2024, hal tersebut bisa dikatakan relatif terjaga. Tingkat inflasi tahunan sebesar 1,57%, yang masih berada dalam kisaran target yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 2,5% dengan toleransi 1%. Inflasi yang rendah menunjukkan bahwa tekanan harga secara keseluruhan masih terkendali, meskipun harga beberapa komoditas pangan masih berfluktuasi. Kebijakan fiskal dan moneter yang hati-hati juga turut membantu menjaga stabilitas ekonomi. Tekanan eksternal masih muncul akibat perubahan suku bunga global, fluktuasi nilai tukar, ketidakpastian geopolitik, pergeseran harga komoditas hingga perang dagang antara Amerika Serikat dan China (Economic Report on Indonesia, 2024).

Perubahan kebijakan perdagangan internasional di Indonesia serta ketidakpastian global akibat perang dagang antara kedua negara adidaya tersebut memanas, sehingga terjadi dinamika harga komoditas pada tahun 2025. Selain itu, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,11% yang merupakan peningkatan dibandingkan dengan pertumbuhan sebesar 5,03% pada tahun 2024. GDP dengan harga saat ini mencapai sekitar Rp23.821,1 triliun, sedangkan GDP dengan harga konstan mencapai sekitar Rp13.580,5 triliun (BPS Indonesia, 2026). Ekspor tetap memainkan peran penting dalam menopang pertumbuhan. Ekspor menyumbang sekitar 22,85 persen terhadap PDB, didukung oleh permintaan terhadap komoditas seperti minyak sawit, besi, baja,

emas, dan produk pertambangan. Ketergantungan pada komoditas membuat kinerja ekspor masih rentan terhadap perubahan harga global dan kebijakan perdagangan internasional (World Bank, 2025).

Maka, dapat disimpulkan bahwa perekonomian Indonesia periode 2019–2025 menunjukkan ketahanan yang konsisten dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 5% meskipun menghadapi tekanan eksternal seperti perlambatan ekonomi global, pandemi COVID-19, dan perang dagang AS-China. Pada 2019, ekonomi tumbuh 5,02% dengan stabilitas makroekonomi yang terjaga, sebelum mengalami kontraksi 2,07% pada 2020 akibat pandemi yang menekan aktivitas ekonomi secara signifikan. Pemulihan dimulai pada 2021 dengan pertumbuhan 3,69% dan berlanjut kuat pada 2022 sebesar 5,31% seiring normalisasi mobilitas dan konsumsi domestik, kemudian stabil di kisaran 5,03–5,11% pada 2023–2025 didorong oleh permintaan domestik dan ekspor komoditas. Meskipun GDP per kapita meningkat dari \$4.174,9 dolar AS (2019) menjadi \$4.960,3 dolar AS (2024) dan diperkirakan terus naik pada 2025, perekonomian masih menghadapi tantangan struktural seperti ketergantungan pada ekspor komoditas, produktivitas rendah, dan ketimpangan. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia menunjukkan resiliensi melalui konsumsi domestik yang kuat dan kebijakan fiskal-moneter yang lebih terjaga, meski kerentanan terhadap dinamika harga komoditas global dan ketidakpastian perdagangan internasional tetap menjadi risiko utama.